

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU :

- Abdul Rasyid Talib, 2008, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdul Salam, 2011, *Hukum Kepolisian*, Penerbit PTIK, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Agus Botosusilo, 1986, *Sistem Hukum Indonesia*, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Amiruddin, Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Radjagrafindo Persada, Jakarta.
- Amir Syamsudin, 2008, *Integritas Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara*, Kompas, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1991, *Korupsi Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramdeia Pustaka Utama, Jakarta.
- , 2002, *Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana*, Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, Jakarta.
- , 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan II.
- , 2012, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- An.S.Maringka, 2017, *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*, Sinar Grafika.
- Allan Coffey, Edwar Eldefonso dan Walter Hartinger, 1982, "An Introduction to The Criminal Justice System and Proses", Prentice hall, New Jersey.
- Antonius Cahyadi, E. Fernando Manurung, 2011, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke 4
- Anthony F. Susanto, 2004, *Wajah Peradilan Kita: Konstruksi Sosial tentang Penyimpangan Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, Refika Adhitama, Bandung.

- Arief Sidharta, 2009, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Cetakan Ketiga, Mandar Maju.
- Azyumardi Azra dan Komaruddin Hidayat, 2008. *Pendidikan Kewargaan (Civic Education), Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Mandiri*, Kencana /renada Media Group.
- Bagir Manan, 2004, *Perkembangan UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- , 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2007, *Beberapa Aspek kebijakan Penegakan Hukum Pidana, 1998-2005*, PT. Citra Aditya bhakti, Bandung, Dimuat dalam *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana, 2007*, Badan penerbit UNDIP, Semarang.
- , 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- , 2013, *Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional ke I s/d IX Dan Konvensi Hukum Nasional 2008 Tentang Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Landasan Konstitusional Grand Design Sistem Politik Hukum Nasional*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro , Semarang.
- , 2015, *Kapita Selektta Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, Pustaka Magister, Semarang.
- , 2015, *Kebijakan Formulasi ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundangan-undangan*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Baharuddin Lopa, 1997, *Masalah Korupsi dan Pemecahannya*, PT Kipas Putih Aksara, Jakarta, cet. I.
- Carl Joachim Friederich, 2010, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Penerbit Nusa Media, Cetakan ke III, Bandung
- Chaerudin, dkk.2008, *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung.

- David O Friedrichs, 2010, *Trusted Criminals White Collar Crime in Contemporary Society*, Wideworth, USA.
- Didin S Damanhuri, 2006, *Korupsi, Reformasi Birokrasi dan Masa Depan Ekonomi Indonesia*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Drumble, Mark. A. 2007, *Atrocity, Punishment and International Law*.: Cambrige University Press, New York.
- Edi Yunara, 2012, *Korporasi & Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus*, PT Citra Aditya Bakti,Bandung.
- Elwi Danil, 2011, *Korupsi Konsep,Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, PT Radja Grafindo Persada.
- Ermasyah Djaya, 2010, *Kajian Yuridis UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Juncto UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Versi UU RI nomor 30 Tahun 2002 juncto UU RI Nomor 46 Tahun 2009 Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Edisi kedua, Sinar Grafika.
- F.A.M Stroink, 2006, *Pemahaman Tentang Dekonsentrasi*, diterjemahkan oleh Ateng Syafrudin, Refika Aditama, Bandung.
- , 1985, J.G Steenbeek, *Inleiding in het Staats en Adminstratief Recht*, Alphen aan den Rijn Samsan H.D Tjeenk Willink,
- George Ritzer. 2012. *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodren*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- G. Peter Hoefnagels, 1971, *The Other Side of Criminologi an Invension of the concept of crime*, Kluwer Deventer- Professor of Criminology Rotterdam University, Sixth United Nations Congress on the Prevention od Cime and the Treatment of Offenders, Departemen of Economics and Social Affairs, United Nation,New York.
- , 1973, *The Other Side of Criminology*, Kluwer-Deventer, Holland.
- Gustav Radbruch, 1950, *Rechsphilosophie*, Koehler Verlag, Stuuatgart.
- H. M. Nurul Irfan,,2012, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Amzah Imprint Bumi Aksara,Jakarta, Edisi ke-dua.
- H.D van Wijk and Willem Konijnenbelt,*Hoofdstukken van Administratif Recht*, Culenborg, UITgeverij,Lemma, BV, p.56.

Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hans Kelsen, 2007, *General Theory of Law and State (Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskripsi-Empirik)*, Alih Bahasa Somardi, BEE Media Indonesia, Jakarta.

Indriyanto Seno Adji, 2000, *Arah Sistem Dalam Proses Peradilan Pidana*, Oemar Senoadji dan Rekan, Jakarta.

-----, Sistem Hukum Pidana dan Keadilan Restoratif, https://www.bphn.go.id/data/documents/fgd_dphn_prof_indriyanto_seno_aji.pdf. Diakses, 3 Februari 2018, jam 10.15 WIB

Indroharto, 1993, *Usaha memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Harapan, Jakarta.

-----, 2005, *Arah dan Sistem Peradilan Pidana*, Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta.

-----, Indriyanto Senoadji, 2006, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Konsultan Hukum Senoadji dan Rekan, Jakarta.

I.S. Susanto, 2001, *Hukum Birokrasi & Kekuasaan di Indonesia*, Walisongo Research Institute (WRI), Semarang.

Ismansyah, 2015, *Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, Cetakan ke 1, Agustus, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

J.G Brouwer dan A.E Snider, 1998, *A Survey of Dutch Administrative law*, Ars Aequilibr, Nijmegen.

J.J.Bruggink, Alih Bahasa B. Arief Sidharta, 1999, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti.

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.

-----, 2006, *Sengketa Konstitusional Lembaga Negara*, Konstitusi Press, Jakarta.

-----, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.

- Johan Yasin, *Hukum Tata Negara Suatu Pengantar*, Deepublish, Budi Utama, Yogyakarta.
- John Austin, 2004, *The Province Of Jurisprudence*, dikutip dari Darji Darmodiharjo, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Gramedia, Jakarta.
- J.W La Patra, 1978, *Analizing The Criminal Justice system*, Lexington Books, Toronto.
- Kristian, 2016, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Tinjauan Teoritis dan Perbandingan Hukum di Berbagai Negara*, Buku Dua, PR Refika Aditama, Bandung.
- , 2017, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Ditinjau dari Berbagai Konvensi Internasional*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Khairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Kedua, Jakarta, Kencana.
- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.
- , 1970, *Legal Theory*, Columbia University Press, New York.
- Lili Rasjidi, I.B. Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- , 2006, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , dan I.B. Wyasa Putra, 2003, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Edisi Pertama cetakan ke-1 thn 2007. Cetakan ke-2 thn 2011, PT Alumni anggota IKAPI, Bandung.
- , 2013, *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi*, Penerbit P.T. Alumni/ Anggota IKAPI, Bandung.
- Lubis.M, dan Scott, J.C, 1993, *Korupsi Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Lukman Hakim, 2012, *Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah, Perspektif Teori Otonomi & Desentralisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Hukum dan Kesatuan*, Setia Press, Malang.

- Moh.Hatta, September 2014, *KPK dan Sistem Peradilan Pidana* Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta.
- Martiman Prodjo Hamdjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No, 31 Tahun 1999)*, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung.
- Moh. Mahfud MD, 1998, *Politik Hukum di Indonesia*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, Cetakan Pertama.
- Maruarar Siahaan, 2008, *Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi yang Hidup*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Meutia Ganie Rachman, 2014, *Sosiologi Korupsi/ Isu, Konsep, dan Perdebatan Meutia Ganie Rachman, Rochman Achwan*, Universitas Indonesia UI-Press, Jakarta.
- Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Muchsan, 1981, *Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi negara dan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Moh. Hatta, 2014, *KPK Dan Sistem Peradilan Pidana* Edisi Pertama, Cetakan Pertama, September, Liberty, Yogyakarta.
- , 2010, *Beberapa Masalah Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Liberty Yogyakarta.
- M.W Kusumah, 2001, *Tegaknya Supremasi Hukum*, PR Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Nico Ngani, 2012, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia.
- Ni'matul Huda, 2016, *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Dalam teori dan Praktik di*, Mahkamah Konstitusi, FH UII Press.
- , *Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, UII Press, Yogyakarta.
- , 2007, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, UII Press, Yogyakarta.
- O.C Kaligis, 2014, *Praktek Tebang Pilih Perkara Korupsi*, Jilid 1, Alumni, Bandung.
- Oemar Seno Adji, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara & Konsultasi Hukum Oemar Seno Adji, & Rekan, Jakarta.

- Peter.G. Hoefnagels, G, 1969, *The Other Side of Criminologi an Invention of the concept of crime*, Kluwer Deventer- Professor of Criminology Rotterdam University.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- Peter Noll, 1973, *Gezetsgebungslehre*, Rohwohlt, Reinbek.
- P.F.C. L Tonnaer, 1996, *Legaal Besturen, Het Legaliteitsbeginsel, Toetssteen of Struikelblok*, Tulisan dalam Bestuur en Norm, Bud, el Opstellen Opedragen aan R. Crince Le Roy, Kluwer-Deventer.
- P. Nicolai,(et al), 1994, *Bestuursrecht*, Amsterdam.
- Pope.J, 2003, *Strategi Memberantas Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Philips DC, 1988, *Holistic Though in Social Science*, Standford University Press, California.
- Philipus M. Hadjon, 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia_Introduction to Indonesian Administrative Law*, Gadjra Mada University Press, Yogyakarta.
- , 2003, "*Kaitan Hukum Administrasi dan Tata Naskah Dinas*", Universitas Airlangga, Surabaya.
- R. Soesilo, 1985, *Kriminologi Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*, Politea, Bogor.
- R Wirjono, 2009, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika.
- Rianto Adi, 2004, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta.
- R.J.H.M Hulsman, *Algemeene Bestuursrecht, een Leiding*, Kobra,Amsterdam.
- Ridwan H.R.,2000, *Hukum Administrasi Negara*, Ull Press, Yogyakarta.
- Romli Atmasasmita, 1996,*Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan abolisonisme*, Binacipta,Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila dan UUD 45 Dalam Perundang-undangan*, Aksara Baru, Jakarta.

- , 1983, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Ghalia Jakarta.
- Rukmini, 2003, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tak Bersalah*, Alumni Bandung.
- Saldi Isra, 2017, *Hukum Yang Terabaikan (Catatan Hukum Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK)*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- , 2017, *Hukum Yang Terabaikan (Catatan Hukum Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK)*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- , 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Presidensial Indonesia*, Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Salim, Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT Radja Grafindo, Jakarta, Cetakan Kedua.
- Satjipto Rahardjo, 1994, *Masalah Penegakan Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.
- , 2003, *Sisi-Sisi Lain Hukum di Indonesia*, Buku Kompas, Jakarta.
- Setiyono, 2013, *Teori-Teori & Alur Pikir Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bayu Publishing, Malang.
- Sidik Sunaryo, 2004, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Cetak. Kedua*, UMM Press, Malang.
- Sirajuddin, dkk, 2006, *Legislatif Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Corruption Wach dengan Yappika, Malang.
- Sjachran Basah, 1992, *Perlindungan Hukum Atas sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung.
- Soedjono Dirjosisworo, *Fungsi Perundang-Undangan Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, PT Sinar Baru, Bandung.
- Soejono, dkk, 1999, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI) Press.
- Suwoto Mulyosudarmo, 1990, *Kekuasaan dan tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Universitas Airlangga, Surabaya.

- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum*, PT Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Teguh Sulistia, Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi Ti Editor Nanang T. Puspito dkk, 2011, *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, Penerbit Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, Direktorat Jenderal Ppendidikan Tinggi, Bagian Hukum Kepegawaian, Jakarta.
- Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang.
- Untung S Radjab, 2003, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Berdasar UUD 1945*, CV Utomo, Bandung.
- Yopie Morya Immanuel Patir, 2012, *Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi*, CV Keni Media.
- Yuliandri, 2010, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundanag-Undangan yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Raja Grafindo Persada, , Cetakan Kedua.
- Zainal Arifin Mukhtar, 2016, *Lembaga Negara Independen, Dinamika perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Zulfan Arif Fakrullah, 2014, dkk, *Hukum Indonesia dalam berbagai Perspektif*, , Raja Grafindo Persada,Depok.

B. Disertasi :

- Anis Ibrahim, 2008, *Legislasi Dalam Perspektif Demokrasi: Analisis Interaksi Politik dan Hukum dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Jawa Timur*, *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum, UNDIP, Semarang.
- Artijo Alkostar, 2007, *Korelasi Korupsi Politik Dengan Hukum dan Pemerintahan di Negara Modern (Telaah tentang Praktek Korupsi Politik dan penanggulangannya)*, *Disertasi*, Program Pascasarjana (S3), Universitas Diponegoro, Semarang.
- Eddy Rifai, 2002, *Analisa Peran kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Tentang Pendekatan Integral Kebijakan Kriminal Pemberantasan Tindak*

Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Lampung), *Disertasi*, Program Pascasarjana (S3), Universitas Indonesia.

Elwi Danil, 2001, Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam penanggulangan Tindak Pidana (Studi Tentang Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi), *Disertasi*, Program Pascasarjana (S3) Universitas Indonesia, Jakarta.

Herlambang, 2011, Formulasi Rumusan Tindak Pidana Penerima Manfaat Hasil Korupsi Dalam Perspektif Kebijakan Pemberantasan Korupsi di Indonesia, *Disertasi*, Universitas Brawijaya, Malang.

Indrianto Seno Adji, 2000, Analisa Kecenderungan Pergeseran Fungsi Ajaran perbuatan Melawan Hukum Materil Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Disertasi*, Program Pascasarjana (S3), Universitas Indonesia.

Hibnu Nugroho, 2011, Membangun Model Alternatif Untuk Integralisasi Penyidikan Tinda Pidana Korupsi di Indonesia, *Disertasi*, Program Pascasarjana, UNDIP, Semarang.

Wandi Subroto, 2017, Rekonstruksi Pengaturan Kewenangan Anggota Legislatif Dalam mencegah Tindak Pidana Korupi Berbasis Nilai keadilan, *Disertasi*, Prodi Doktr Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Ridwan, 2010, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, *Disertasi*, Program Pascasarjana (S3), Universitas Diponegoro, Semarang.

Sutarman, 2002, Kerjasama Antar Daerah Dalam Pelayanan Perizinan Dan Penegakan Hukum Penangkapan Ikan Di Wilayah Laut, *Disertasi* Universitas Airlangga, Surabaya.

Yudi Kristiana, 2008, Rekonstruksi Birokrasi Kejaksaan dengan Pendekatan Hukum Progresif (Studi Penyelidikan dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi), *Disertasi*, Program Pascasarjana (S3), Universitas Diponegoro, Semarang.

C. Tesis :

Aria Juliatman Syamsir, 2012, Koordinasi Kewenangan Penyidik Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi {Studi Keterkaitan Antara Kepolisian, Kejaksaan Dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), *Tesis*, S2, Program Ilmu Hukum, UGM.

Sahuri Lasmadi, 2009, Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, *Tesis*, Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.

Salahuddin Luthfie, 2011, Kewenangan Kejaksaan Dalam penyidikan Tindak pidana korupsi, *Tesis*, Fakultas Hukum, Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, 2011.

D. Jurnal/Proceedings/Hasil Penelitian :

Ali Dahwir, Rekonstruksi Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Punishment Prevention Oriented), *Lex Publica*, Jurnal Ilmu Hukum Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia, Volume IV, Nomor 1, November 2017 ISSN: 2354-9181, hlm 648-64.

Ateng Syafrudin, 2000, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab, *Jurnal Pro Justitia Edisi V*, Universitas Parahiyangan, Bandung.

Cornelis Lay, 2006, State Auxiliary Agencies, *Jurnal Hukum Jentera*, Edisi 12 Tahun III April- Juni.

Elwi Danil, Beberapa Konsep Sistem Peradilan Pidana dan Penerapannya Dalam KUHAP, *Jurnal Ilmu Hukum YUSTITIA*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Volume 19 Nomor 2 (Juli – Desember) 2012, ISSN :0854 – 6185, Padang.

Febri Diansyah, Emerson Yuntho dan Donal Fariz, *Laporan Penelitian Penguatan Pemberantasan Korupsi melalui Fungsi Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK, Cetakan I Oktober 2011*, Indonesian Corruption Watch (ICW), dengan Dukungan Eropa Union (EU) – UNODC (United Nation Office on Drugs and Crime).

Iemas Masyitoh, Dinamika Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, Volume 10, Nomor 1 Februari, 2009.

Jeremy Pope dan Gerald E. Caiden dalam Toward a General Theory of Official Corruption, *Asian Journal of Public Administration*, Vol. 10 No. 1 Tahun 1988,

John Graffithst, 1970, *Ideology in Criminal*, The Yale Law Journal Volume 79 Number 3 Januari 1970

M Aris Purnomo, Eko Sopyonyono, *Rekonseptualisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Polri Dalam Rangka Efektivitas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*,

Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum, Volume 11, Nomor 2, Tahun 2015 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

- Muladi, 2007, Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Hukum* Nomor.2 Vol. 14 April
- Nanang Sri Darmadi, 2015, Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Artikel*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 2 Mei - Agustus
- Ricca Anggraeni, Penggunaan Hasil Penyadapan Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Yudisial*, Volume III No 2/Agustus/2010,
- Robert. C. Fellmet, 1985, "A Theory of Regulation; A Platform for State Regulatory Reform", *The California Regulatory, Law Report*, Vol 5.No.2 , Spring
- Santi Laura Siagian, Pujiyono, Sukinta, Implikasi Pluralisme Kewenangan Penyidikan Dalam PenyelesaianTindak Pidana Korupsi, *Diponegoro Law Journal* Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
- Sukmareni, Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Percepatan Pemberantasan Korupsi Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Proceeding 2nd National Conferencee Postgraduate Student of Law (CoPS of Law) 2017, Refleksi 3 Tahun Penegakan Hukum Jokowi-JK*, Direktorat Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Sabtu 9 Desember 2017, Intelegensia Media, 2017
- , Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Artikel*, International Conference Civic Education 2017, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, 2-5 Oktober 2017
- , Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Pagaruyuang Law Journal*, Volume 1 Nomor 2, Edisi Februari 2018, ISSN Print : 2580-4227, ISSN Online : 2580-698X
- , 2016, An Investigation Authority of Criminal Act on Corruption In Criminal Justice System in Indonesia, *The 2nd Proceeding " Indonesian Clean Corruption in 2020" Comparative Law System of Procurement of Goods and Service around Countries in Asia, Australia and Europe*, Unissula Press, ISBN : 978-602-1145-41-8
- , 2018, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korusi Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Proceedings Call or Papers*, Pada Simposium dan pelatihan Hukum Pidana ke V, Revitalisasi Hukum Pidana Adat dan kriminologi Kontemporer, diselenggarakan atas kerjasama Fakultas hukum Universitas Andalas Padang dengan Masyarakat Hukum Pidana (MAHUIKI)

Yoserwan dan Agustina, Shinta dan Ferdi, 2006, Penyusunan Model Sinkronisasi Dan Koordinasi Pelaksanaan Kewenangan Penegak Hukum Dalam Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) Laporan Penelitian Hibah Bersaing, Fakultas Hukum Universitas Andalas

E. Makalah :

Artidjo Alkostar, 18-21 November 2013, Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime, Ketua Kamar Pidana MA-RI, *Makalah*, Disampaikan Pada Acara Pengarusutamaan Pendekatan Hak Asasi Manusia Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Bagi Hakim Seluruh Indonesia, Santika Premiere Jogja

Bagir Manan, Wewenang Propinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah, *Makalah*, pada Seminar nasional yang diselenggarakan Fakultas Hukum UNPAD, Bandung, 13 Mei 2000

Philipus M.Hadjon, 1994, Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, *Makalah*, Disampaikan pada Orasi Guru Besar Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 10 Oktober

F. Pidato Pengukuhan Guru Besar :

Eddy O.S. Hiariej, 30 Januari 2012, Pembuktian Terbalik dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi, “ *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*”, Diucapkan di depan Rapat Terbuka Majelis Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Harkristuti Harkrisnowo, 2003, Rekonstruksi Konsep Pidanaan: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pidanaan di Indonesia, *Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Jakarta

G. Kamus/Encyclopedi :

Andi Hamzah, 1986, Kamus Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), cetakan 1

Ahmad Warson Munawir, 1984, *Kamus Al-Mumumiir Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pongpes Krapyak al-Munawwir

A.I.N Kramer S.T, 1997, *Kamus Kantong Inggris Indonesia*, PT Ikhtiar Baru van Hoeve, 1997

Bryan A. Garner, 2004, *Black's Law Dictionary*, Edisi Delapan, West Publishing CO, Amerika Serikat

Charlie Rudyat, 2013, *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardika

Ensiklopedia Indonesia, 1983, Jilid 4, Ikhtisar baru van Hoeve dan Elsevier Publishing, Jakarta

Hasan Shadily, et al, ed, 1983, *Ensiklopedia Indonesia* (Jilid 4), Jakarta, Ikhtisar Baru – van Hoeve dan Elsevier Publishing Projects

Hendry Campbell Black, 1978, *Black's Law Dictionary*, United State of Amerikan, West Publishing Co

John M. Echols dan Hassan Shadily.2015, ” *Kamus Inggris Indonesia*”. Edisi yang diperbarui. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

-----, 1977, *Kamus Inggris Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta

-----, 2015, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta , Edisi Empat, Cetakan Kesembilan

St Paul Minn, 1999, *Black's Law Dictionary* (7th Ed) West Group

Wijowasito, 1999, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, PT Ikhtiar Baru, Jakarta

W.J.S Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, PN Balai Pustaka

H. Koran Harian, Majalah :

Frans Hendra Winata, 2003, *Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum dan Sistem Peradilan*, *Majalah Hukum Nasional Nomor 1*, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), DEpartemen Kehakian dan HAM, Jakarta

Harkistuti Harktrisnowo, 2003, *Reformasi Hukum di Indonesia, Menuju Upaya Sinergisik Untuk Pencapaiannya*, *Majalah Hukum Nasional Nomor 2* Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman dan HAM, Jakarta

Marulak Pardede, Ahli Peneliti Utama Bidang Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum Dan HAM-RI, Sumber : *Harian Republika*, hlm 8, 14 Februari 2012

I. Dokumen/Laporan :

ICW dan UNDOC, 2014, *Revisi SKB/MOU Optimalisasi Pemberantasan Korupsi*

Kementerian Keuangan RI, 2011, *Laporan Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Semester II (Tahunan)*

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, 2004, *Laporan Tahunan*, Jakarta

-----, 2016, *Laporan Tahunan*, Jakarta

-----, 2017, *Laporan Tahunan*, Jakarta

-----, 2015-2019, *Rencana Strategis*, Jakarta

Kongres PBB, Eighth UN Congress, *Dokumen A/CONF.144/L.3, The Prevention of Crime and The Treatment of Offender*

Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 2016, *Laporan Tahunan*, Jakarta

Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, *Document A/CONF.121/L.9*

Sixth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, 1971, New York, Departemen of Economics and Social Affairs, United Nation

J. Putusan Hakim

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007 tentang *Permohonan Pengujian kewenangan jaksa sebagai penyidik Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Kejaksaan yang dimohonkan oleh Djailuddin Kaisupy PNS Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Makasar*

Putusan MK Dalam Perkara Nomor 95/PUU-XV/2017, Yang Dibacakan Pada Tanggal 21 Februari 2018, tentang *Permohonan Pengujian Materiil Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

Putusan MK Dalam Perkara Nomor 95/PUU-XV/2017 tentang *Permohonan Pengujian Materiil Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002*

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

K. PERUNDANG-UNDANGAN

Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang *Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*, tanggal 13 November 1998

Ketetapan MPR RI Nomor VIII/MPR/2001 tentang *Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*, tanggal 9 November 2001

Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Ketetapan MPR VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara RI.

Undang-Undang No.24 (PRP) tahun 1960 tentang *Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).

Undang-Undang No.3 tahun 1971 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).

Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang *Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang *Transfer Dana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164. Merubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324.

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang *Pengesahan United Nation Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-*

- Bangsa Anti Korupsi, 2003*). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620
- United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi,
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang *Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang *Pokok-Pokok Kepegawaian*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890)
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang *Pemerintahan yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
- Undang-Undang Nomor 3/2002 tentang *Pertahanan Negara*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang *Perundang-Undangan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389
- Undang-Undang Nomor 34/2004 tentang TNI. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang pengoperasian pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, PN Padang, PN Pekanbaru, PN Palembang, PN Tanjung Karang, PN Serang, PN Yogyakarta, PN Banjarmasin, PN Pontianak, PN Samarinda, PN Makassar, PN Mataram, PN Kupang, dan PN Jayapura.
- Keputusan Presiden BJ. Habibie Nomor 89 Tahun 2000 untuk memisahkan struktur dan peran TNI – Polri

- Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/ Peperpu/013/1950 tentang
- Peraturan Penguasa Militer tanggal 9 April 1957 Nomor Prt/PM/06/1957, tanggal 27 mei 1957 Nomor Prt/PM/03/1957,
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1983 tentang *Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Peraturan Pemerintah Nomor. 58 Tahun 2010 Tentang Peraturan Pelaksana KUHAP*
- Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 tentang *Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2003 Tentang *Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Beserta Perangkat Penyelenggara Pemilihan Umum*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 103 Tahun 2012 *tentang Manajemen SDM KPK*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2006 Tentang *Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2010 tentang *Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 Tentang *Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa*
- Peraturan Presiden Nomor. 26 Tahun 2005 Tentang *Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia..*
- Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang *Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.*
- Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang *Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;*
- Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2017 tetang *Perubahan Peraturan Presidn Nomor 52 tahun 2010 tentang Susunan Oranisasi dan Tata kerja kepolisian Negara Republik Indonesia*
- Perpres No 54 Tahun 2018 tentang *Strategi Nasional Pencegahan Korupsi* yang diundangkan tanggal 20 Juli 2018 dengan Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 108
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang *Percepatan Pemberantasan Korupsi*

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang *Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015*,

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/Ja/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia 12 tahun 2009 tentang *Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Tindak Pidana di Lingkungan Kepolisian*

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia 14 TAHUN 2012 Tentang *Manajemen Penyidikan Tindak Pidana*. Berita negara RI 2012 No 686

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2017, yang menggantikan Perkap No 21 Tahun 2010 tentang *Susunan Organisasi dan Tata kerja pada Tingkat Markas besar Kepolisian Negara Republik Indonesia*

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-152/A/JA/10/2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentang *Pembentukan Tim pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan (TP4) baik di Pusat maupun di Daerah*

Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-518/A/J.A./11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-132/J.A/11/1994 tanggal 7 November 1994 tentang *Administrasi Perkara Tindak Pidana dan Kelaziman Praktik Penanganan Perkara TPK*

Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia No. KEP-07/P.KPK/02/2004 tanggal 10 Februari 2004 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi, susunan organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi*

Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia No.: KEP-06/P.KPK/02/2004 tanggal 10 Februari 2004 Tentang *Kode Etik Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia*.

Nota kesepahaman antara KPK RI, Kejaksaan RI dan Kepolisian RI, Nomor SPJ - 97/0155/03/2017 , Nomor Kep – 087/A/JA/03/2017, Nomor B/27/III/2017 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

Convention on Bribery of Foreign Public Official in International Business Transaction

Internet

<http://hukum.kompasiana.com/2012/09/30/inilah-kewenangan-kpk-yang-mau-dipangkas-dpr-497977.html>. Diakses Senin tanggal 17 September 2012, jam 8.00

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50269adb024b6/kewenangan-penyidikan-kpk-dan-polri>. Diakses Senin tanggal 17 September 2012

<http://news.detik.com/read/2012/08/04/093627/1983031/10/ini-mou-kpk-polri-soal-wewenang-penyidikan-korupsi> Diakses Senin tanggal 17 September 2012

<http://nasional.kompas.com/read/2012/08/30/1955462/MK.Sudah.Jelas.Penyidikan.di.KPK>, Diakses Senin tanggal 17 September 2012

<http://nasional.kompas.com/read/2012/08/28/13432318/Polri.KPK.dan.Kejaksaan.Agung.Digugat.terkait.Kasus.Korlantas>. Diakses Senin tanggal 17 September 2012, Jam 9.40 WIB

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/10/30/mcpds5-kpk-pertanyakan-kewenangan-korlantas-ajukan-gugatan>. Diakses Senin tanggal 17 September 2012. Jam 9.55

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50c1b8812f2ae/kpk-klaim-punya-kewenangan-angkat-penyidik>. Diakses Senin tanggal 17 September 2012 jam 10.00

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/10/02/mb9p7j-ketua-ky-kewenangan-kpk-justru-harus-diperkuat>. Diakses Senin tanggal 17 September 2012jam 1035 WIB

<http://online-journal.unja.ac.idhttp://mhunja.blogspot.com/2013/02/tumpang-tindih-kewenangan-penyidikan.html>, Diakses Senin tanggal 17 September 2012, jam 11 WIB

http://video.tvonenews.tv/arsip/view/59896/2012/08/06/polri_gelar_pertemuan_bahas_sengketa_penyidikan_korupsi_simulator.tvOnep. Diakses, sabtu 15 September 2012, jam 14.00 WIB

<http://online-journal.unja.ac.idhttp://mhunja.blogspot.com/2013/02/tumpang-tindih-kewenangan-penyidikan.html>. Diakses 17 September 2012, Jam 14.20

<http://www.negarahukum.com/hukum/dilema-penyidik-independen-kpk.html>. Diakses hari Senin tanggal 31 Desember 2012, Jam 14.10 WIB

<https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi>, diakses rabu tggal 23 agustus 2017, jam 06.30

https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1, Diakses 27 Agustus 2017, jam 8.15

<http://www.Tribunnews.com/nasional/2016/08/29>. Diakses Sabtu tggal 14 Februari 2017 jam 14.00 WIB

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171017081945-12-248916/densus-tipikor-diantara-ra-hasrat-tito>- Diakses Sabtu tggal 14 Februari 2017 jam 13.00 WIB

[Http://www.Tribunnews.com/nasional/2016/08/29](http://www.Tribunnews.com/nasional/2016/08/29). Diakses Sabtu tggal 14 Februari 2017 jam 14.10 WIB

<https://www.kamusbesar.com/> Diakses selasa tanggal 16 Januari 2018, jam 07.45

https://tirto.id/peneliti-icw-uu-penyadapan-tak-bisa-berlaku-pada-kpk-cwx1?gclid=Cj0kcqia_v_... hsbrcka
risagassrbjrkako8llydp6ey7g53tn8hkqolbxjr9twejfcdggyjn8koebaagaarfqealw_wcb, diakses elasa tanggal 16 januari 2018, jam 10.30

<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/17636/t/DPR+Minta+KPK+Perbaiki+Prosedur+Penyadapan>, Diakses selasa tanggal 16 Januari 2018, jam 11.00

<https://www.kpk.go.id/id/component/content/article/79-berita/berita-media/3209-kpk-to-lak> -empat-poin-revisi. Diakses kamis, tanggal 18 Januari 2018, jam 15.20

<https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/2989-tanggapan-atas-rencana-dpr-ri-untuk-melakukan-revisi-undang-undang-nomor-30-tahun-2002-tentang-komisi-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi>

<https://www.kpk.go.id/id/component/content/article/79-berita/berita-media/3232-yang-harus-diawas-i-penyadapan-lain>. Diakses hari sabtu tanggal 20 Januari 2018, jam 08.30

<https://www.kpk.go.id/id/component/content/article/79-berita/berita-media/3201-pelemahan-kpk-tidak-terbendung>, Diakses Sabtu tanggal 20 Januari 2018, jam 9.30

<https://nasional.kompas.com/read/2015/02/13/16351581/Saksi.Ahli.Ungkap.Multitafsir.sosal.Kolektif.Kolegial.dalam.UU.KPK>. Diakses 12 Mei 2018, jam 8.10

<https://acch.kpk.go.id> , Diakses, Senin 7 Mei 2018, jam 10.00 WIB

https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=3, Diakses, 4 Mei 2018, jam 10.00

https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/tren_korupsi_2017_0.pdf, Diakses 4 Mei 2018, jam 10,25

<http://bawas.mahkamahagung.go.id/portal/component/content/article/3-artikel-khusus-badan-pengawas/323-korupsi-sebagai-extra-ordinary-crime>- Diakses 6 Mei 2018, jam 16.00

<https://nasional.sindonews.com/read/962184/13/penjelasan-kpk-soal-kolektif-kolegial>- Diakses, 4 Mei 2018, jam 10.15

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/02/23/lztpqj-inilah-3-alasan-mengapa-korupsi-disebut-kejahatan-luar-bisaa>. Diakses 10 Juni 2018, jam 12.00 WIB

<http://www.beritasatu.com/satu/482763-10-nama-dari-kejagung-dan-polri-ikut-seleksi-deputi-penindak-an-kpk.html>, Diakses, Kamis, 21 Juni 2018, jam 16.00 WIB

<https://kabarpolisi.com/berita-utama/1923.html>. Diakses Jumat, tanggal 22 Juni 2018, jam 17.20 WIB

<https://kabarpolisi.com/berita-utama/1923.html>. Diakses Jumat, tanggal 22 Juni 2018, jam 17.20 WIB

